

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita: Provinsi Jawa Tengah

Halaman 2

## Pemprov Diminta Sertifikasi Aset

**Gema Gedung Berlian**

**SERTIFIKASI** aset menjadi salah satu usulan yang disampaikan oleh DPRD Jateng untuk mendata dan menata aset yang dimiliki oleh Pemprov Jateng. Langkah itu harus ditempuh, agar aset yang dimiliki bisa optimal meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Anggota Komisi C DPRD Jateng Hasan Asy'ari mengatakan, sejauh ini pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah kurang maksimal. Bahkan dari PAD yang didapat, mayoritas diperoleh dari pajak kendaraan bermotor. Selain itu aset yang ada belum sepenuhnya bersertifikat.

"Tentu sebelum melakukan optimalisasi, sertifikasi aset ini yang harus ditempuh biar semua jelas keberadaan maupun statusnya. Baik aset yang dikelola organisasi perangkat daerah, maupun instansi khusus yang mengelola aset daerah," kata Hasan, kemarin.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini melanjutkannya, langkah selanjutnya adalah pemetaan aset berdasarkan letak dan fungsinya agar memiliki manfaat yang maksimal. Baik itu dikelola sendiri oleh Pemprov maupun kerja sama dengan badan usaha milik daerah (BUMD), dan swasta murni.

Hanya saja, semuanya harus dilakukan dengan perencanaan proyeksi. Baik itu proyeksi peruntukan aset yang ada maupun hasil yang akan diperoleh. "Tentu dalam hal ini tidak boleh asal-asalan. Butuh analisis yang matang. Jangan sampai potensinya miliaran, kemudian hasilnya hanya puluhan juta," ucap Hasan yang juga Wakil Ketua DPW PKB Jateng ini.

Menurutnya, dalam penataan maupun optimalisasi aset butuh profesionalisme. Mulai dari perencanaan, pengelolaan, maupun sumber daya manusia (SDM) yang ada. "Kami juga harap aset ini benar-benar jadi perhatian. Karena dari tahun ke tahun persoalan ini belum bisa diselesaikan dengan tuntas," bebernya.

Berdasarkan keterangan Pemprov Jateng, jelas Hasan, total aset yang ada saat ini nilainya Rp 36 triliun. Atas dasar itu, keberadaannya harus dikelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas untuk menghasilkan PAD yang optimal. **(Hanung Soekendro-64)**